




PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUMPULAN DATA KINERJA**

 <p><b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BALANGAN</b></p>	Nomor SOP	<b>005/SOP/BAKESBANGPOL-BLG/2023</b>
	Tanggal Pembuatan	<b>02 Februari 2023</b>
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Pengesahan	<b>02 Februari 2023</b>
	Disahkan oleh	<b>Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan</b>
	Judul SOP	<b>Pengumpula Data Kinerja</b>

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</li> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah</li> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki kemampuan pengelolaan data</li> <li>Mengetahui tugas dan fungsi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</li> <li>Mengetahui tugas dan fungsi dalam pembuatan laporan kinerja</li> </ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan</li> <li>SOP Penyusunan Laporan Kinerja</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Renstra</li> <li>Renja</li> <li>Format Indikator Kinerja Utama</li> <li>Perangkat Komputer</li> </ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyusunan Laporan Kinerja tidak maksimal dan tidak mencapai kinerja sesuai target yang ditetapkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disimpan sebagai dokumen pengendalian dan evaluasi kinerja</li> </ol>

SOP : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Buku			Ket.
		Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubbag Program	Kepala Subbagian/ Fungsional	Staf Penyusun Evaluasi Kinerja	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Mengumpulkan data laporan kinerja triwulan kepada bidang, OPD, dan instansi terkait	Mulai					Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi	15 Menit	Disposisi	
2.	Merekap laporan kinerja triwulan						Disposisi Perjanjian Kinerja, Kinerja Aksi	30 Menit	Lembar Disposisi	-
3.	Mengolah data laporan kinerja triwulan						Disposisi Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Progres Bulanan	2 Menit	Draft Laporan Kinerja	-
4.	Menyusun laporan kinerja triwulan						Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Draft Laporan Kinerja	30 Menit	Draft Laporan Kinerja	
5.	Mensosialisasikan laporan kinerja triwulan kepada pejabat terkait						Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Draft Laporan Kinerja	30 Menit	Draft Laporan Kinerja	-
6.	Merekap data untuk menyusun laporan triwulan						Catatan Pembagian Tugas	2 Hari	Disposisi	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Buku			Ket
		Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubbag Program	Kepala Subbagian/ Fungsional	Staf Penyusun Evaluasi Kinerja	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Menyusun laporan triwulanan dan laporan tahunan		Ya		Tidak		Data Laporan Kinerja Triwulan	120 Hari	Lembar Disposisi	-
8.	Mensosialisasikan laporan triwulan		Tidak				Hasil Koreksi Laporan Kinerja Triwulan	60 Menit	Draft Laporan Kinerja	-
9.	Menyusun 4 (empat) Laporan triwulan menjadi laporan kinerja tahunan	Ya					Laporan Kinerja Triwulan	15 Menit	Draft Laporan Kinerja	-

Selesai

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Balangan

